

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA

Restria, Cahyonowati¹

Restriawijaya@yahoo.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the information about The determinants of Board of Commissioners Monitoring Activity in Indonesia. This study was conducted by using Board of Commissioner meeting frequency as dependent variable. The independent variables are Ownership Concentration, Insider Ownership, Board Size, Independent Commissioner Ratio and the Company Size.

This research was conducted by using Multiple Regression as a hypothesis test. Data collection in this study used purposive sampling to non-banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. There were 73 companies used as sample in this study.

Result of this study showed that independent variables which are Insider Ownership and Board size negatively affected Board of Commissioner meeting frequency. The other variable, that is size, positively affected the dependent variable.

Key words: Corporate Governance, Board of Commissioner Meeting, Board of Commissioner Monitoring Activity

PENDAHULUAN

Dalam suatu kondisi yang digambarkan oleh konsentrasi kepemilikan, pemegang saham yang dominan mungkin saja mencari cara untuk memaksimalkan keperluan mereka sendiri dan mengambil alih kekayaan dari investor-investor lainnya (Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004; Greco, 2011). Investasi yang menguntungkan dapat saja dibatalkan demi keuntungan-keuntungan pribadi (Shleifer dan Wolfenzon, 2002; Greco, 2011). Dalam situasi ini, konflik agensi terdapat diantara pemegang saham orang dalam yang mayoritas dan pemegang saham orang luar yang minoritas.

Para pemilik dengan jumlah saham yang signifikan dapat mengambil tindakan yang agresif terhadap keputusan-keputusan perusahaan. Contoh keputusan perusahaan yang dapat mereka pengaruhi seperti keputusan perusahaan pada pemilihan anggota dewan dan penggantian CEO atau manajemen yang buruk dengan hak suara mereka pada RUPS.

Permasalahan yang dihadapi oleh para pemegang saham orang luar minoritas adalah mereka tidak mempunyai kekuatan pengendalian yang sama dengan para pemegang saham orang dalam blok besar, karena para pemegang saham orang luar tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini menyebabkan para pemegang saham orang dalam dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan para pemegang saham orang luar. Sementara para pemegang saham orang dalam yang besar menikmati keuntungan-keuntungan dari pengendalian pribadi, para pemegang saham orang luar hanya bertumpu pada aktivitas pengawasan *Board of Directors* (Fama dan Jensen, 1993; Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004).

Masalah lainnya yang dihadapi oleh para pemegang saham orang luar adalah informasi yang asimetris. Terdapat perbedaan informasi yang didapat oleh para pemegang saham orang dalam dengan para pemegang saham orang luar. Tentunya para pemegang saham orang dalam mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan dibandingkan dengan para

¹ Corresponding author

pemegang saham orang luar. Pada akhirnya hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham.

Latar belakang permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah teori agensi, dimana para pemegang saham dalam mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan dan mampu mengendalikan serta mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham orang luar. Penelitian ini dilakukan dalam latar agensi yang dicirikan melalui pengendalian para pemegang saham yang besar.

Menurut Claessen, Djankov dan Lang (dikutip oleh Tim Corporate Governance BPKP, 2002) di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia, pengendalian oleh keluarga tercermin dengan lebih besarnya proporsi hak suara mereka dibandingkan dengan proporsi hak dividennya. Satu penelitian pernah menunjukkan bahwa 67,3% perusahaan yang telah terdaftar secara publik dipegang oleh keluarga (Kurniawan dan Indriantoro, 2000). Di negara ini permasalahan agensi tidak muncul diantara para pemilik dengan manajer, tetapi mungkin diantara para pemegang saham dengan pengawasan yang kuat dan pemilik minoritas yang lemah (Lukviarman, 2004).

Good Corporate Governance muncul sebagai suatu standar bagi perusahaan untuk dapat melindungi para pemegang sahamnya. Salah satu komponen penting GCG adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai peran penting dalam implementasi GCG karena Dewan Komisaris bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam *corporate governance*.

Dewan Komisaris hadir sebagai wakil dari investor-investor untuk menjaga kepentingan dari investor tersebut. Secara garis besar Dewan Komisaris bertugas mengawasi aktivitas dari perusahaan agar berjalan dengan semestinya. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite. Salah satu komite yang digunakan dalam mengawasi perusahaan adalah Komite Audit.

Dewan Komisaris bersama dengan alat bantuannya, Komite Audit, berperan penting dalam mengawasi perusahaan untuk kepentingan para investor. Dengan kemunculan Dewan Komisaris sebagai wakil dari investor dan Komite Audit sebagai alat bantu Dewan Komisaris, maka muncul ketertarikan dari para investor terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Carcello, *et al.*, (2002) menyatakan bahwa tingkat kerajinan pada aktivitas pengawasan seharusnya diukur oleh jumlah dari rapat yang diadakan dan perilaku anggota-anggota individu sebelum, sesaat dan setelah rapat dilakukan. Sementara tingkat kerajinan aktivitas pengawasan menganut beberapa komponen, jumlah rapat Komite Audit per tahun digunakan pada umumnya sebagai wakil yang diterima secara luas untuk aktivitas pengawasan Komite Audit karena menyajikan sinyal terkait usaha dari Komite Audit dan unsur-unsurnya (DeZoort, *et al.*, 2002; Mendez dan Garcia, 2007; Raghunandan dan Rama, 2007; Sharma, *et al.*, 2009; Barua, *et al.*, 2010 dan Greco, 2011).

Frekuensi rapat sering dianggap dalam kepustakaan sebagai wakil untuk tingkat aktivitas pengawasan yang diserahkan (Collier dan Gregory, 1999; Vafeas, 1999; Laksmana, 2008; Sharma, *et al.*, 2009). Penelitian sebelumnya menghubungkan frekuensi rapat dengan beberapa keuntungan untuk para pemegang saham (Carcello, *et al.*, 2002 dan Laksmana, 2008).

Menurut pendapat Lipton dan Lorsch (1992) serta Yatim, *et al.* (2006) Dewan Komisaris yang sering bertemu akan melaksanakan kewajibannya dengan rajin yang dapat bermanfaat untuk pemangku kepentingan. Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi diantara anggotanya sebagai proses aktivitas pengawasan terhadap manajemen. Dapat dikatakan bahwa semakin sering frekuensi rapat dilaksanakan maka semakin banyak dan cepat Dewan Komisaris mendapatkan informasi perkembangan perusahaan. Melalui rapat, Dewan Komisaris berunding dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat.

Berdasarkan hasil penelitian Xie, *et al.* semakin sering Dewan Komisaris mengadakan rapat, akual kelolaan perusahaan akan semakin mengecil (dikutip oleh Waryanto, 2010). Dengan kata lain, semakin sering frekuensi rapat Dewan Komisaris, fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap manajemen akan efektif. Oleh karena itu, frekuensi rapat digunakan sebagai proksi dari aktivitas pengawasan Dewan Komisaris pada penelitian ini.

Beberapa studi mengarahkan secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat, dan kebanyakan dari studi tersebut hanya menghubungkan dengan aktivitas Komite Audit

(Vafeas, 1999; Mendez dan Garcia, 2007; Raghundanan dan Rama, 2007 dan Sharma, *et al.*, 2009). Pada penelitian ini akan mencoba menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat Dewan Komisaris. Hal tersebut didasarkan dengan penerapan GCG yang dipengaruhi oleh dua peranan penting yaitu Dewan Komisaris dan Komite Audit. Akan tetapi Komite Audit bagian dari Dewan Komisaris sehingga Komite Audit tidak memiliki otoritas pengambil keputusan. Komite Audit hanya dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hasil temuan dari aktivitas pengawasannya.

Penelitian ini menghubungkan faktor-faktor yang ada hanya dengan aktivitas pengawasan Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan ruang lingkup aktivitas pengawasan Komite Audit lebih spesifik kepada laporan keuangan dan pengendalian internal, berbeda dengan Dewan Komisaris yang memiliki ruang lingkup yang besar termasuk mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan, menilai dan mengambil keputusan mengenai kinerja direksi. Penelitian ini menguji frekuensi rapat Dewan Komisaris karena ruang lingkup aktivitas pengawasan Dewan Komisaris yang luas berbeda dengan Komite Audit.

Penelitian ini dibuat mengacu pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Greco (2011) dalam lingkup di Italia. Penelitian tersebut menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan karakteristik Dewan Komisaris dengan tingkat aktivitas dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Struktur kepemilikan terdiri dari *variable independent* konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial (*Insider Ownership*). Karakteristik Dewan Komisaris terdiri dari variabel ukuran Dewan Komisaris, proporsi direksi independen, CEO duality, dan kehadiran komisaris independen sebagai *chairman*. Terdapat juga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan sejak terdaftar di bursa efek dan ROA. Pada penelitian ini, perusahaan perbankan tidak termasuk kedalam sampel penelitian karena memiliki struktur GCG yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya.

Berbeda dengan penelitian Greco (2011), penelitian ini hanya menguji frekuensi rapat dari Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan karena ruang lingkup aktivitas pengawasan Dewan Komisaris yang lebih luas dibanding Komite Audit. Penelitian ini menggunakan kembali *variable-variable independent* dan variabel *size* dari penelitian yang dilakukan Greco (2011) kecuali CEO *duality*. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut *two-tier board system* dimana Dewan Komisaris tidak dapat bertindak selaku Dewan Direksi juga, sehingga *variable* tersebut tidak dapat digunakan. Hal ini lah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang mirip dengan Greco tetapi dengan ruang lingkup perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada akhir tahun 2011.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah teori agensi antara pemegang saham orang dalam (*insiders*) dengan pemegang saham orang luar (*outsiders*) serta pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Pemegang saham *insiders* dan mayoritas memiliki keuntungan pengendalian yang besar dan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan *outsiders* dan minoritas. Sementara para pemegang saham orang dalam menikmati keuntungan mereka dalam mengendalikan perusahaan secara pribadi, para pemegang saham orang luar hanya mengandalkan pada aktivitas pengawasan Dewan Komisaris (Fama dan Jensen, 1983; Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004). Semenjak pengawasan yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham orang luar hanya melalui aktivitas pengawasan Dewan Komisaris, maka menarik untuk meneliti aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Frekuensi rapat bisa menjadi proksi dari waktu yang dimiliki dari para direksi untuk bekerja dan sebagai tingkat dari aktivitas pengawasan yang diberikan (Vafeas, 1999; Carcello, *et al.*, 2002; Laksmana, 2008). Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Dalam latar agensi yang dicirikan oleh konsentrasi kepemilikan, para pemegang saham orang dalam yang besar mengambil keuntungan dari keuntungan-keuntungan dalam pengendalian pribadi dan menikmati akses langsung terhadap informasi (Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004). Pengendalian pemegang saham yang dominan tidak mempunyai insentif untuk membantu perkembangan aktivitas dari dewan dan Komite Audit, semenjak lingkungan insentif

pengawasan akan menambah biaya dari penggalian keuntungan pribadi untuk mereka (Leftwich, *et al.*, 1981; Shleifer dan Vishny, 1997).

Hubungan Konsentrasi Kepemilikan dengan frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pengendalian para pemegang saham yang dominan tidak mempunyai insentif untuk membantu perkembangan dari aktivitas dewan karena lingkungan insentif pengawasan dapat meningkatkan biaya dalam penggalian keuntungan pribadi untuk mereka (Leftwich, *et al.*, 1981; Shleifer dan Vishny, 1997). Dalam latar agensi yang dicirikan konsentrasi kepemilikan, pemegang saham mayoritas mungkin saja memiliki motivasi untuk mengambil alih apa yang menjadi ketertarikan dari minoritas (Feng Yin, *et al.*, 2011). Hasil penelitian sebelumnya yang terkait mengungkapkan bahwa pengendalian para pemegang saham yang besar mempunyai dampak negatif terhadap frekuensi rapat Komite Audit (Mendez dan Garcia, 2007). Sehingga diharapkan pada penelitian konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh negatif dengan frekuensi rapat Dewan Komisaris.

H1 : *Ceteris Paribus*, kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Kepemilikan manajerial dapat mempunyai dua dampak. Di satu sisi, kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan manajemen dan kepentingan dari pemegang saham sehingga mengurangi biaya keagenan (Greco, 2011). Dalam sudut pandang ini, kepemilikan manajerial dapat menggantikan mekanisme pengendalian yang lainnya (Leftwich, *et al.*, 1981; Fama dan Jensen, 1983).

Namun disisi lain, kepemilikan orang dalam yang besar dapat berkubu pada para direksi, oleh karena itu meningkatkan biaya agensi untuk para pemegang saham (Sharma, *et al.*, 2009, h. 252). Literatur menemukan bukti empiris yang mendukung pandangan ini (Fan dan Wong, 2002; Barclay, *et al.*, 2007). Penelitian sebelumnya memperkirakan efek substitusi antara pemegang saham orang dalam dan aktivitas pengawasan oleh direksi, baik dewan maupun Komite Audit. Pandangan ini didukung oleh penelitian terkait. Pemegang saham orang dalam ditemukan berpengaruh negatif dengan frekuensi rapat dewan (Vafeas, 1999). Formula hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H2 : *Ceteris Paribus*, Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Menurut Vafeas (1999) sementara mekanisme pengendalian yang komplementer dan substitusi mungkin menjelaskan pecahan dari variasi aktivitas dewan, variabel-variabel mewakili untuk ketidakefisienan dewan yang mungkin menjelaskan pecahan lainnya dari variasi tersebut. Dalam dewan yang besar keuntungan-keuntungan dari kapasitas pengawasan yang ditingkatkan mungkin sebanding dengan permasalahan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih lambat (Lipton dan Lorsch, 1992; Jensen, 1993). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa seiring peningkatan ukuran dewan, inefisiensi dapat mengurangi aktivitas Dewan Komisaris.

H3 : *Ceteris Paribus*, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Literatur akademik sangat menyadari bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan berkontribusi untuk meningkatkan pengawasan (Carcello, *et al.*, 2002). Carcello, *et al.* (2002) menyatakan bahwa komisaris independen dalam dewan dan Komite Audit mungkin menginginkan pengawasan yang lebih terhadap proses pelaporan keuangan untuk menjaga reputasi mereka dan nilai pasar mereka sebagai ahli keputusan (Leftwich, *et al.*, 1981).

Vafeas (1999) berpendapat bahwa komisaris independen mungkin menginginkan frekuensi rapat dewan yang lebih banyak untuk menambah kemampuan mereka dalam mengawasi manajemen. Menon dan Williams (1994) menemukan, dengan sampel perusahaan US, aktivitas Komite Audit berpengaruh positif dengan proporsi komisaris independen dalam dewan (Menon

dan Williams, 1994, h. 133). Dengan begitu diharapkan adanya pengaruh positif antara proporsi komisaris independen dengan aktivitas Dewan Komisaris.

H4 : *Ceteris Paribus*, proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

Hubungan *Size* dengan frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Semakin besar perusahaan akan semakin rumit tingkat kompleksitasnya. Perusahaan yang besar berpotensi menciptakan masalah keagenan pada pelaporan keuangan yang lebih besar. Oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin membutuhkan aktivitas pengawasan lebih besar.

Penelitian Sutaryo, *et al.* (2010), Greco (2011) dan Feng Yin, *et al.* (2011) dapat membuktikan bahwa variabel *size* berpengaruh positif signifikan terhadap frekuensi rapat baik rapat Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Dengan begitu diharapkan *size* mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris di Indonesia.

H5 : *Ceteris Paribus*, *size* berpengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pada penelitian sebelumnya aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris maupun Komite Audit diukur melalui frekuensi rapat. Pada penelitian ini, variabel ini diukur melalui jumlah rapat Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2011.

Variabel independen dalam penelitian ini ialah Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen dan *size*. Konsentrasi Kepemilikan diukur melalui persentase saham umum terbesar yang dimiliki investor pada perusahaan. Kepemilikan Manajerial diukur melalui jumlah saham umum yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Ukuran Dewan Komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota Dewan Komisaris. Pengukuran Proporsi Komisaris Independen melalui persentase Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Terakhir, *size* diukur dengan log dari total aset pada tahun 2011.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. Sumber data pada penelitian ini berupa *annual report* perusahaan periode tahun 2011 yang dipublikasikan dan perusahaannya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan perusahaan perbankan sebagai sampel karena memiliki pedoman GCG yang berbeda. Data yang dibutuhkan tiap variabel terdapat pada *annual report*. Perusahaan yang memiliki data tidak lengkap tidak digunakan sebagai sampel penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda sebagai metode analisis. Analisis regresi berganda digunakan karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien dengan t tabel, dengan tingkat signifikansi 10%, 5% dan 1%. Jika t hitung < t tabel, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Model 1

$$\text{RDK} = \alpha + \beta_1 (\text{K_Kepi}) + \beta_2 (\text{K_Mani}) + \beta_3 (\text{J_DKi}) + \beta_4 (\text{R_KLi}) + \beta_5 (\text{Sizei}) + e_i$$

Keterangan :

RDK = Jumlah rapat Dewan Komisaris periode tahun 2011.

K_Kep = Konsentrasi Kepemilikan, persentase dari saham biasa oleh pemilik saham terbesar.

K_Man = Kepemilikan manajerial, persentase saham biasa yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi.

J_DK = Ukuran Dewan Komisaris, dihitung dari jumlahnya.

R_KI = Komposisi Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen per total angka anggota Dewan Komisaris.

Size = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui karakter sampel yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	RDK	K_Kep	K_Man	R_KI	J_DK	Size
N	73	73	73	73	73	73
Mean	8,92	0,44	0,06	0,38	4,56	12,30
Median	6	0,42	0,00	0,33	5	12,29
Std. Deviation	8,75	0,21	0,11	0,12	1,88	0,79
Minimum	2	0,10	0,00	0	2	10,48
Maximum	45	0,96	0,65	0,80	11	14,19

Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

Keterangan : RDK = Rapat Dewan Komisaris; K_Kep = konsentrasi kepemilikan; K_Man = kepemilikan manajerial; R_KI = rasio komisaris independen; J_DK = ukuran Dewan Komisaris; Size = ukuran perusahaan.

Variabel dependen pada model regresi adalah jumlah rapat Dewan Komisaris yang dilambangkan dengan RDK. Jumlah sampel penelitian sebanyak 73 perusahaan. Jumlah rapat paling sedikit adalah 2 kali dan paling banyak 45 kali. Terlihat bahwa rentang nilai variabel ini sangat jauh. Hal tersebut juga dapat dilihat pada nilai standar deviasi yang hampir sebesar nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa data sangat menyebar. Nilai rata-rata diatas nilai median menunjukkan bahwa rata-rata nilai data tersebut termasuk tinggi.

Variabel independen konsentrasi kepemilikan memiliki rentang nilai yang sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai minimum sebesar 0,10 dan nilai maksimum sebesar 0,96. Nilai standar deviasi sebesar 0,21 hampir setengah dari nilai mean menunjukkan penyebaran pada data. Nilai rata-rata sedikit diatas nilai median menunjukkan rata-rata data tinggi.

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00001 dan nilai maksimum sebesar 0,65. Rentang nilai minimum dan nilai maksimum terlihat jauh. Melihat standar deviasi sebesar 0,11, dimana lebih besar dari nilai mean, dapat disimpulkan bahwa data menyebar luas. Nilai mean jauh diatas nilai median menunjukkan rata-rata data yang tinggi.

Rasio komisaris independen yang paling kecil menunjukkan angka 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang belum memenuhi GCG karena rasio komisaris independen pada perusahaan telah ditetapkan minimal 30% dari jumlah Dewan Komisaris. Rata-rata variabel ini sebesar 0,38 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia telah memenuhi pedoman GCG tersebut. Standar deviasi sebesar 0,12 dibandingkan dengan nilai mean tidak terlalu besar. Rata-rata data tinggi dilihat dari perbandingan mean dengan median.

Pada variabel ukuran Dewan Komisaris, nilai standar deviasi menunjukkan data yang menyebar apabila dibandingkan dengan selisih dari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai mean lebih kecil daripada nilai median menunjukkan nilai rata-rata data variabel ukuran Dewan Komisaris rendah.

Variabel *size* memiliki nilai minimum sebesar 10,48 dan nilai maksimum sebesar 14,19. Rentang nilai minimum dan nilai maksimum pada variabel *size* dapat dikatakan dekat. Standar

deviasi sebesar 0,79 menunjukkan bahwa data tidak menyebar luas. Nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai median menunjukkan bahwa rata-rata data menyebar diatas nilai tengah yang dapat disimpulkan rata-rata data tinggi.

Uji Goodness of Fit

Tabel 2
Ringkasan Hasil Olah Data

Model	Hipotesis	Coeff	t
1 (Constant)		-1,892**	-2,004
K_Kep	Hp1 (-)	-0,106	-1,062
K_Man	Hp2 (-)	-0,597***	-3,381
J_DK	Hp3 (-)	-0,027**	-2,065
R_KI	Hp4 (+)	0,154	0,901
Size	Hp5 (+)	1,755*	1,931
R ²		0,222	
Adj R ²		0,164	
F Hitung		3,832**	
Df ₁		5	
Df ₂		67	
N		73	

Sumber : data sekunder yang diolah, 2013.

Keterangan : Variabel dependen model regressi RDK = jumlah rapat Dewan Komisaris. Variabel independen : K_Kep = konsentrasi kepemilikan; K_Man = kepemilikan manajerial; R_KI = rasio komisaris independen; J_DK = ukuran Dewan Komisaris; Size = ukuran perusahaan. N model regressi 73. *signifikan pada 0,10. **signifikan pada 0,50. ***signifikan pada 0,01.

Koefisien Determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Namun model regressi yang digunakan adalah model regressi berganda sehingga untuk menguji model yang tepat digunakan nilai *adjusted R²*.

Pada tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,164. Hal ini berarti 16,4 % variasi indeks pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel independen Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen dan *Size*, sedangkan sisanya 83,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji F

Untuk menguji hipotesis menggunakan statistik F dilakukan dengan cara membandingkan Hasil F hitung dengan nilai F tabel. Apabila F hitung lebih besar dibandingkan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% maka semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai F hitung tersedia pada tabel 4.6 sedangkan nilai df₁ dan df₂ didapat pada tabel hasil Uji Statististik F yang tersedia di lampiran.

Nilai df₁ 5 dan df₂ 67 pada tingkat kepercayaan 5% sehingga didapat nilai F tabel sebesar 2,35. Nilai F hitung (3,832) jauh lebih besar dibandingkan dengan F tabel (2,35) sehingga dapat disimpulkan model regressi baik.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial didalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Hasil SPSS dari Uji t disajikan pada tabel 2 ringkasan hasil olah data.

Dari tabel 2 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$RDK = -1,892 - 0,106 K_Kep - 0,597 K_Man - 0,027 J_DK + 0,154 R_KI + 1,755 size + e$$

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris dapat mengurangi frekuensi rapat Dewan Komisaris. Untuk variabel Proporsi Komisaris Independen dan *size* dapat menambah frekuensi rapat dari Dewan Komisaris.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada tabel 2 disimpulkan sebagai berikut

Tabel 3
Rangkuman Hasil Hipotesis

No	Hipotesis	Kesimpulan
1	H1 : Ceteris Paribus, kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris	Ditolak
2	H2 : Ceteris Paribus, Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris	Diterima
3	H3 : Ceteris Paribus, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris	Diterima
4	H4 : Ceteris Paribus, Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris	Ditolak
5	H5 : Ceteris Paribus, <i>Size</i> berpengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris	Diterima

Hipotesis 1

Berdasarkan analisis statistik deskriptif tabel 1, variabel RDK memiliki nilai mean diatas median yang dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut tinggi. Hal yang serupa ditunjukkan pada variabel konsentrasi kepemilikan. Kedua variabel memiliki nilai rata-rata yang tinggi sehingga dapat dilihat pengaruh positif dari variabel konsentrasi kepemilikan.

Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena standar deviasi yang tinggi dari variabel konsentrasi kepemilikan. Penyebaran data variabel konsentrasi kepemilikan luas sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Karena hasil penelitian menunjukkan variabel konsentrasi kepemilikan tidak signifikan, maka disimpulkan bahwa H1 ditolak.

Hasil diatas menyatakan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi jumlah rapat Dewan Komisaris. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Greco (2011) di Italia. Greco tidak dapat menemukan hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan frekuensi rapat dewan di Italia. Alasannya adalah terdapat dua pendapat mengenai konflik agensi. Pertama yaitu semakin besar kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi konflik agensi antara pemegang saham dengan manajemen yang dapat membuat Dewan Komisaris bekerja lebih giat dalam melakukan aktivitas pengawasan. Pendapat yang kedua adalah semakin besar kepemilikan yang terkonsentrasi maka semakin besar biaya agensi karena pemegang saham mayoritas mampu mengendalikan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham minoritas.

Hipotesis 2

Rata-rata kepemilikan manajerial tinggi, sama seperti variabel RDK. Dengan begitu arah pengaruh dari kepemilikan manajerial terlihat positif. Akan tetapi hasil penelitian menyatakan arah pengaruh yang negatif. Hal tersebut dikarenakan nilai standar deviasi (0,11) yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan mean (0,6) sehingga analisis melalui statistik deskriptif kurang reliable. Nilai signifikansi dari kepemilikan manajerial sebesar 1%. Jadi dapat disimpulkan H2 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Greco (2011) di Italia yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat dewan. Hal tersebut karena semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen maka manajemen dapat mengendalikan perusahaan dan biaya keagenan akan meningkat (Sharma, *et al.*, 2009). Literatur yang mendukung pandangan ini adalah literatur dari Vafeas (1999), Fan dan Wong (2002) dan Barclay, *et al.* (2007).

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap frekuensi rapat Dewan Komisaris atau Komite Audit tidak selalu negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo, *et al.* (2010) di Indonesia mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi biaya agensi melalui frekuensi rapat. Kepemilikan manajerial dapat menggantikan mekanisme pengendalian yang lainnya (Leftwich, *et al.*, 1981; Fama dan Jensen, 1983). Hal tersebut terjadi karena manajemen mempunyai motif yang sama dengan pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pandangan ini didukung oleh Fama dan French (2001).

Hipotesis 3

Nilai mean lebih rendah dibandingkan nilai median sehingga disimpulkan rata-rata data variabel ukuran Dewan Komisaris rendah. Rata-rata variabel ini yang rendah dibandingkan rata-rata dependen yang tinggi menunjukkan pengaruh yang negatif. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh kearah negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Karena ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan, maka hipotesis 3 diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ukuran Dewan Komisaris mempengaruhi rapat Dewan Komisaris. Sementara itu penelitian Al-Najjar (2011) di Inggris menunjukkan bahwa Dewan Komisaris bertemu lebih banyak ketika jumlah Dewan Komisaris bertambah banyak sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif dengan frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Hal tersebut terjadi karena terdapat dua pandangan mengenai efek dari ukuran Dewan Komisaris terhadap ukuran rapat Dewan Komisaris. Pada jumlah Dewan Komisaris yang besar mungkin saja terjadi masalah-masalah koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih lambat (Lipton dan Lorsch, 1992) sehingga jumlah dewan yang besar mengakibatkan inefisiensi yang dapat mengurangi frekuensi rapat Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Pendapat lainnya menyatakan semakin besar ukuran Dewan Komisaris maka akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai kesepakatan. Pendapat ini diadopsi oleh Vafeas (1999) serta Brick dan Chidambaran (2007).

Hipotesis 4

Rata-rata rasio komisaris independen tinggi. Hal tersebut sama seperti rata-rata dari RDK. Oleh karena itu dapat dilihat pengaruh positif dari variabel rasio komisaris independen. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian. Namun hasil menunjukkan variabel rasio komisaris independen tidak signifikan. Hal itu dikarenakan nilai standar deviasi yang tinggi sehingga penyebaran data yang luas dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hasil variabel ini tidak signifikan sehingga hipotesis 4 ditolak.

Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Greco (2011) yang dapat membuktikan komisaris independen dapat membantu meningkatkan kerajinan dari Dewan Komisaris yang diukur melalui frekuensi rapatnya. Pandangan ini juga didukung oleh penelitian Al-Najjar (2011) di Inggris. Komisaris independen termotivasi membantu kinerja perusahaan karena untuk melindungi reputasi mereka dan menjaga nilai pasar mereka sebagai ahli pengambil keputusan (Leftwich, *et al.*, 1981). Oleh karena itu komisaris independen akan meningkatkan aktivitas pengawasan (Carcello, *et al.*, 2001).

Akan tetapi Sharma, *et al.* (2009) berpendapat bahwa untuk menjaga status independennya, komisaris independen akan mengurangi frekuensi rapat. Hal tersebut dilakukan komisaris independen dengan alasan untuk mengurangi bernegosiasi agar tidak terpengaruh dan tetap objektif dalam mengambil keputusan.

Iklim GCG yang diterapkan di Italia dan di Inggris berbeda dengan di Indonesia. Di Italia dan Inggris menganut sistem *corporate governance* anglo-saxon yang memungkinkan terjadinya CEO *duality* sehingga dibutuhkan peran dari komisaris independen sedangkan di Indonesia iklim GCG nya berbeda. Tidak ada CEO *duality* di Indonesia. Keberadaan komisaris independen seperti pemenuhan formalitas peraturan saja (Sutaryo, *et al.*, 2010). Komisaris independen dalam mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Kim, 2005; Brennan, 2006).

Hipotesis 5

Variabel *size* memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Begitu pula dengan variabel dependen. Dengan begitu, dapat dilihat pengaruh positif dari variabel *size*. Hal yang sama ditunjukkan pada hasil regresi. Hasil regresi juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel ini dengan tingkat signifikansi dibawah 10%. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang rendah dari data variabel *size*. Hasil menunjukkan *size* berpengaruh positif secara signifikan terhadap RDK, maka hipotesis 5 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel *size* berhubungan positif dengan rapat Dewan Komisaris. Greco (2011) juga membuktikan hubungan yang positif antara *size* dengan frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sama seperti penelitian terdahulu (Menon dan Williams, 1994; Raghundanan dan Rama, 2007; Mendez dan Garcia, 2007) hubungan positif antara *size* dengan frekuensi rapat Komite Audit signifikan pada tingkat kepercayaan 10%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan akan cenderung berpotensi membuat masalah keageanan terkait pelaporan keuangan (Sharma, *et al.*, 2009). Oleh karena itu membutuhkan tingkat pengawasan yang ketat.

Berbeda dengan hasil penelitian yang lainnya, Al-Najjar (2011) membuktikan pengaruh yang negatif antara variabel *size* dengan frekuensi rapat Dewan Komisaris. Penelitian ini menunjukkan semakin besar perusahaan dengan kompleksitas yang semakin rumit maka akan memilih pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor eksternal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan Dewan Komisaris. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan kecuali perbankan yang terdaftar di BEI dan mengeluarkan *annual report* periode tahun 2011.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Greco (2011) di Italia yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris sedangkan Konsentrasi Kepemilikan tidak memiliki dampak. Hasil ini juga konsisten dengan analisis korelasi Spearman yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Komposisi Dewan adalah variabel kunci dalam tingkat aktivitas pengawasan Dewan (Greco, 2011). Dalam penelitian ini komposisi Dewan Komisaris ditunjukkan dengan ukuran Dewan Komisaris yang memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas rapatnya. Walaupun demikian, proporsi Komisaris Independen tidak memiliki dampak. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya CEO *duality* sehingga keberadaan Komisaris Independen hanya sebagai pemenuhan peraturan saja (Sutaryo, *et al.*, 2010).

Kelemahan pada penelitian ini adalah frekuensi rapat dianggap kurang efektif dalam menggambarkan tingkat aktivitas pengawasan dari Dewan Komisaris karena peneliti tidak dapat mengetahui agenda dan durasi dari rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris tersebut. Oleh karena itu, apabila masa mendatang terdapat informasi yang lebih efektif dalam mendeskripsikan aktivitas pengawasan Dewan Komisaris maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai proksi dari aktivitas pengawasan

REFERENSI

- Al-Najjar, B. 2011. The Determinants Of Audit Committee Independence and Activity: Evidence From The UK. "*International Journal of Auditing*", Vol. 15 No. 2, pp. 191-203.
- Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Neal, T.L. and Riley, R.A. Jr. 2002. Board Characteristics and Audit Fees. "*Contemporary Accounting Research*", Vol. 19 No. 3, pp. 365-80.
- DeZoort, T., Hermanson, D.R., Archambeault, D. and Reed, S. 2002. Audit Committee Effectiveness: A Synthesis Of The Empirical Audit Committee Literature. "*Journal of Accounting Literature*", Vol. 21, pp. 38-75.
- Dyck, A. and Zingales, A. 2004. Private Benefits Of Control: An International Comparison. "*The Journal Of Finance*", Vol. 59 No. 2, pp. 537-600.

- Fama, E.F. and Jensen, M.C. 1983. Separation Of Ownership and Control. "*Journal of Law & Economics*", Vol. 25, pp. 301-25.
- Fan, J.P.H. and Wong, T.J. 2002. Corporate Ownership Structure and The Informativeness Of Accounting Earnings In East Asia. "*Journal of Accounting and Economics*", Vol. 33 No. 3, pp. 401-25.
- Ghozali, I . 2011."Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Cetakan V". Semarang: Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
- Greco, G. 2011. Determinants Of Board and Audit Committee Meeting Frequency: Evidence From Italian Companies. "*Managerial Auditing Journal*", Vol. 26 No. 3, pp. 208-29.
- Jensen, M. and Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structur, "*Journal of Finance Economics 3*", pp. 305-360.
- Kalbers, L.P. and Fogarty, T.J. 1993. Audit Committee Effectiveness: An Empirical Investigation Of The Contribution Of Power. "*Auditing: A Journal Of Practice & Theory*", Vol. 12 No. 1, pp. 24-49.
- Lukviarman, N. 2004. Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance? "*Jurnal Siasat Bisnis*", Vol. 2 No. 9, pp. 139-156.
- McMullen, D.A. and Raghunandam, K. 1996. Enhancing Audit Committee Effectiveness. "*Journal of Accountancy*", Vol. 182 No. 2, pp. 79-81.
- Mendez, C.F. and Garcia, R.A. 2007. The Effects Of Ownership Structure and Board Composition On The Audit Committee Meeting Frequency: Spanish Evidence. "*Corporate Governance: An International Review*", Vol. 15 No. 5, pp. 909-22.
- Raghunandan, K. and Rama, D.V. 2007. Determinants Of Audit Committee Diligence. "*Accounting Horizons*", Vol. 21 No. 3, pp. 265-97.
- Sharma, V., Naicker, V. and Lee, B. 2009. Determinants Of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence From Voluntary Governance System. "*Accounting Horizons*", Vol. 23 No. 3, pp. 245-64.
- Shleifer, A. and Vishny, R. 1997. A Survey Of Corporation Governance. "*Journal of Finance*", Vol. 52 No. 2, pp. 737-83.
- Shleifer, A. and Wolfenzon, D. 2002. Investor Protection and Equity Market. "*Journal Of Financial Economics*", Vol. 66, pp. 3-27.
- Sutaryo, Payamta and Bandi. 2010. Penentu Frekuensi Rapat Komite Audit: Bukti Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia. "*Good Corporate Governance*".
- Vafeas, N. 1999. Board Meeting Frequency and Firm Performance. "*Journal Of Financial Economics*", Vol. 53, pp. 113-42.
- Yin, F., Gao, S., Li, W. and Huaili. 2011. Determinants of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence From Chinese Listed Companies. "*Managerial Auditing Journal*", Vol. 27 No. 4, pp. 425-444.